

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berangkat dari sebuah tulisan yang dimuat di salah satu laman media *online* tentang “Mengapa Mata Pelajaran Sejarah Tidak Disukai?”. Keluhan peserta didik cenderung stereotip, “Saya tidak kuat hafalan”. Tak hanya soal banyak hafalan. Pelajaran ini tidak atraktif, karena guru sejarah kebanyakan mendongeng ketika menyampaikan materi. Padahal buku sejarah yang berisi materi yang didongengkan sang guru itu mudah didapat. Ruang digital menyuguhkan cerita dongeng yang kapan saja bisa diakses. Mendongeng satu arah, seringkali membuat peserta didik mengantuk dan tidak bisa menangkap pelajaran. Apalagi jika pelajaran ini ditempatkan di jam terakhir (Matasani 2016). Alih-alih dinanti, perhatian peserta didik lebih menunggu kapan bel pulang sekolah bunyi. Pelajaran sejarah pun terus terpuruk di mata anak-anak.

Sebagai guru sejarah, ada rasa prihatin ketika situasi di ruang kelas sejarah menjadi perhatian para jurnalis dan menjadi konsumsi publik. Mereka seolah enggan menganalisis permasalahan pembelajaran sejarah di Indonesia, dan perlu digarisbawahi permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di negeri kita. Selama melakukan “peziarahan intelektual”, hasil dari *self history approach* pribadi saya, hampir di setiap negara di dunia mengalami hal yang sama. “Peziarahan intelektual” saya sampai pada satu buku berjudul *The End of Education* dan sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Akhirnya saya melakukan proses kontemplasi atau refleksi. Saya mengutip satu paragraf dari buku itu, bunyinya;

“Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa satu cara ini atau cara itu merupakan cara untuk belajar. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan satu cara ini atau satu cara itu merupakan cara terbaik untuk mengetahui tentang segala hal-untuk merasakan berbagai hal-untuk melihat bermacam hal-untuk mengingat banyak hal-menerapkan berbagai hal-menghubungkan segala sesuatu, dan bahwa tidak ada hal-hal lainnya yang bisa diperlakukan dengan cara begitu. Pada kenyataannya, upaya untuk membuat pernyataan seperti di atas adalah meremehkan proses belajar yang mereduksinya menjadi sebuah keterampilan mekanis” (Postman 2019)

Rangkaian kalimat renungan yang sangat menggugah bahkan mengajarkan kita, bila setiap peserta didik adalah individu yang unik, dan butuh pencerahan di diri guru, terlebih guru sejarah. Namun alangkah baiknya jika kita telusuri apa saja masalah yang mengganggu pembelajaran sejarah hingga stereotip buruk belajar sejarah perlahan bisa diperbaiki. Dari sudut pandang saya, ada tiga situasi yang membuat pembelajaran sejarah mengalami permasalahan. Tiga situasi ini diulas berdasarkan guru dan pembelajaran sejarah (metode mengajar, sumber belajar, dan media pembelajaran) serta riuhnya kebijakan Kemendikbud menyederhanakan Kurikulum Pendidikan Sejarah.

1.1.1 Guru dan Pembelajaran Sejarah

Terlalu banyak permasalahan di ruang-ruang pembelajaran sejarah. Semuanya punya keterkaitan satu dengan lainnya. Keterkaitan ini bagaikan mendirikan benang basah, butuh kebijaksanaan dari kita. Diantara permasalahan itu adalah stereotip peserta didik tentang sejarah sebagai pelajaran hafalan. Proses kompetensi menghafal dalam pembelajaran sejarah memperburuk posisi mata ajar sejarah. Kondisi ini sudah tercipta sejak lama. Dan kondisi mata pelajaran sejarah makin menimbulkan permasalahan di masa Orde Baru. Pada kekuasaan Orde Baru, pelajaran sejarah berfungsi sebagai alat politik penguas, artinya pengajaran sejarah sarat dengan nuansa politis penguasa. Argumentasi ini turut didedahkan dalam buku teks Sejarah Nasional Indonesia dimana unsur militeristik sangat kental terlihat di dalam buku SNI untuk buku teks sejarah SMA sebagai wujud dominasi ideologi kekuasaan dan merepresentasikan politik militer (Mulyana, 2013, hlm.83). Terlebih lagi pemerintah hanya fokus di bidang pembangunan dan ekonomi fisik (pembangunanisme). Jadi hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan fokus pemerintahan tidak begitu diperhatikan termasuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, terutama pembelajaran sejarah. Politisasi mata ajar sejarah yang fungsinya memperkuat kedudukan penguasa selama rezim Orde Baru (Wiriaatmadja, 1998, hlm.92), menggambarkan sulitnya guru dan peserta didik membangun kompetensi. Pola berpikir sejarah baik guru maupun peserta didik, diarahkan pada kepentingan penguasa.

Darmaningtyas menyampaikan, rezim Orba menggunakan pendidikan sejarah menjadi alat memperkuat kekuasaan. Justifikasi dan indoktrinasi terhadap kekuasaan militeristik dianggap ideologi yang harus dipatuhi (Ahmad, 2010, hlm.3). Pembelajaran sejarah juga mengalami kesulitan ketika sejarah kontemporer yang membahas isu-isu sejarah kontroversial tidak diperdalam para guru sejarah. Pembahasan sejarah kontroversial sangat memungkinkan terbentuknya pemikiran kritis peserta didik. Mengutip pendapat Fallahi dan Haney,

...isu kontroversial dalam kelas berpotensi untuk mewujudkan warga negara yang baik. Melalui pembelajaran isu-isu kontroversial siswa terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengungkapkan gagasannya dan memecahkan masalah. Namun demikian dinyatakan bahwa harus ada persiapan yang matang agar pembelajaran isu kontroversial dapat berjalan dengan baik (Ahmad, Sodiq, dan Suryadi, 2014, hlm. 270).

Realitas sejarah sebagai pelajaran hafalan disampaikan oleh Zed (2018, hlm. 55), tinjauannya bersumber dari sisi guru. Guru sejarah masih senang memakai teknik *accumulation of facts to be remembered* yang dalam pandangannya tidak lazim dan jauh relevansinya dengan kondisi kekinian. Guru sejarah kurang melakukan pendekatan-pendekatan narasi sejarah, misalnya; memanfaatkan biografi tokoh sejarah lokal sebagai media meningkatkan berpikir historis siswa (Purnaman, 2016, hlm. 51) atau kunjungan ke situs-situs sejarah. Guru belum memaknai fungsi situs sejarah menjadi salah satu sumber belajar. Sejatinya, lawatan wisata mengajak peserta didik memahami satu peristiwa sejarah yang sebelumnya masih bersifat abstrak. Dengan lawatan sejarah peserta didik merasakan empirisme pengetahuan mereka karena akan memberikan pemahaman lebih nyata tentang peristiwa apa yang pernah terjadi di situs tersebut (Kean, Dentis, dan Wasa, 2018, hlm. 253). Sebagian guru memandang situs sejarah hanya berupa wisata sejarah dan tidak diberikan tindakan afirmatif dari guru. Azaryahu & Foote, (2008) dan Summerby-Murray (2001) telah membuktikan, situs-situs sejarah yang berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal kita bahkan dekat dengan kehidupan peserta didik, terbengkalai dan tidak disadari guru untuk dijadikan sumber belajar siswa (Sulistyo, 2019, hlm.50). Harusnya guru punya kesadaran utuh manfaat situs sejarah bukan sekadar *heritage* atau warisan sejarah dan budaya semata. Situs sejarah bisa dijadikan media dan sumber belajar peserta didik yang menyenangkan. Peserta didik tidak sekadar mendengarkan kisah sejarah dibalik

situs namun siswa terjun langsung *tracking* (Safitri, Utomo, dan Amin 2018, hlm 181-182) sehingga bentangan imajinasi tersusun di pikiran mereka. Realitas yang saya gambarkan itu mengindikasikan bahwa guru sejarah belum memahami keutamaan konsep dan kompetensi *historical thinking* dalam pembelajaran sejarah yang salah satunya diperoleh dari situs sejarah. Konsep situs sebagai sumber belajar sedang dikembangkan Provinsi Riau. Konsep ekowisata sebagai sumber belajar, bukan cuma berinteraksi dengan alam di lingkungan situs (cagar budaya), juga melahirkan rasa penasaran peserta didik tentang peristiwa masa lalu di balik situs atau artefak yang ditinggalkan (Wilaela, 2018, hlm. 53).

Dan yang paling hangat serta masih terus didiskusikan masyarakat, wacana kebijakan pemerintah (Mendikbud) untuk menyederhanakan kurikulum sejarah SMA dan menghapus mata ajar sejarah di SMK (Azanellah, 2020). Wacana paling esktrim menurut saya karena kemunculannya di tengah konstelasi politik Indonesia yang baru saja merampungkan Pemilu. Masyarakat Indonesia terpolarisasi akibat perang dukungan dari masing-masing pasangan. Isu penyederhanaan kurikulum sejarah SMA-SMK ini ramai diperbincangkan lewat beragam media. Isu muncul setelah beredarnya draf sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen. PPM-MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) merespon wacana kebijakan Mendikbud ini. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, mengingatkan pihak Kemendikbud sekaligus menegaskan bahwa pelajaran sejarah merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa, oleh karenanya pelajaran sejarah sebaiknya tetap berlaku sebagai mata pelajaran wajib (Puspa, 2020).

Saya turut merasakan keberatan atas wacana itu, akan tetapi banyak faktor yang mungkin jadi pertimbangan mengapa kebijakan itu digulirkan hingga publik merespon dengan begitu antusias antara pro dan kontra. Saya melihat ada persoalan yang berkaitan dengan cara berpikir guru sejarah khususnya konsep-konsep dasar sejarah. Asumsi saya diperkuat dengan argumentasi seorang narasumber ketika mengikuti webinar sejarah bahwa faktor penting yang membuat pelajaran sejarah kurang menarik karena materi pengantar ilmu sejarah di jenjang sekolah menengah

belum tuntas diajarkan guru kepada peserta didik.¹ Namun ini perlu pembuktian kajian sehingga dasar argumentasinya kuat.

Wacana kebijakan Mendikbud, pada hakekatnya merupakan sinyal kepada kalangan yang mencintai sejarah, terutama kepada kita yang berkecimpungan di pendidikan sejarah. Sinyal yang merupakan momen untuk memperbaiki persoalan di pelajaran sejarah, baik LPTK sebagai lembaga persiapan calon guru sejarah, tenaga pendidik (guru dan dosen), maupun kalangan pecinta sejarah, tidak lantas menanggapi wacana tersebut secara negatif yang kemudian memberi tekanan atas keinginan di jajaran pengambil kebijakan. Kita juga tidak menjadi terprovokasi atas berkembangnya wacana kebijakan seperti ini melainkan mencari solusi dengan menanggapinya lebih profesional. Meskipun ada kesan bila pemerintah kurang menghargai pentingnya pendidikan sejarah dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Kesan yang bisa ditangkap adalah pemerintah sedang menyalakan alarm untuk mendorong perbaikan dalam pembelajaran sejarah.

Diskursus dari beragam kalangan akan menimbulkan efek positif dan bertujuan memperbaiki persoalan di pelajaran sejarah. Tujuan dari perbaikan ini adalah bagaimana pelajaran sejarah punya posisi penting merekatkan kecintaan peserta didik pada bangsa dan negaranya melalui narasi dalam buku teks dan media lainnya. Kehadiran pelajaran sejarah saling berkelindan dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia terkhusus di era yang penuh disrupsi ini karena pemahaman atas jalannya Revolusi 4.0 membutuhkan kesiapan mental bangsa Indonesia agar kearifan peserta didik tidak tercerabut dari akar budaya. Revolusi 4.0 bisa saja memberi impresifitas negatif andai bangsa ini tidak mampu memanfaatkan peluang. Duryat (2019, hlm. 93) menawarkan pentingnya antisipasi yang baik, khususnya di dunia pendidikan. Ini bermaksud untuk menemukan peluang baru di masa depan melalui peningkata 4 C (*creativity, critical thinking, communicatian, dan collaboration*).

Banyak diantara kita kurang paham kedudukan sejarah dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial. Clifford Geertz dalam bukunya

¹ https://www.youtube.com/watch?v=G4_IxWwfM3c

Agricultural Involation: The Process of Ecological Change in Indonesia dan *The Social History of Indonesia Town* adalah hasil karya antropologi yang menggunakan pendekatan sejarah diakronis dan sikronis (Kuntowijoyo 2018, hlm. 86). Disini kita bisa melihat tanpa kemampuan berpikir historis, Geertz tidak akan menghasilkan karya antropologinya. Dan berpikir sejarah atau *historical thinking* inilah yang semestinya dikuasai guru sejarah mengajarkan sejarah. Ada lagi yang menarik mengapa sejarah jadi mata pelajaran membosankan. Titik pusatnya ada pada pedagogik historis guru. Abdullah (1996), menuturkan, bahwa;

...sejarah diajarkan untuk memungkinkan peserta didik memahami gejala sosial dan orientasi bangsa secara rasional. Akhirnya, betapapun berbagai corak kisah sedih telah terjadi, sejarah yang diajarkan dilandaskan pada suatu ideologi bangsa yang dihayati. Pancasila sebagai landasan ideologis pelajaran sejarah harus tampil sebagai pandangan hidup yang mempunyai kepercayaan terhadap hari depan bangsa. Dengan pelajaran sejarah maka Pancasila memunculkan diri sebagai *the ideology of hope*, bukan *the ideology of fear* dalam menempuh masa depan.

Perkembangan kurikulum dari periode ke periode tidak memiliki signifikansi merubah pemikiran peserta didik pada jenjang sekolah menengah untuk kemudian mendudukan pelajaran sejarah sebagai komponen esensial dalam pembentukan karakter peserta didik, sumber daya manusia, dan pembangunan identitas nasional Indonesia. Dalam pandangan Latif (2020, hlm. 6-18),

...bangsa ini sudah waktunya melakukan reinterprestasi konsep pendidikan dengan menguraikan bagaimana wacana kebangkitan baru melalui kritik tentang kekeliruan kita atas beberapa konsepsi: *pertama*, miskonsepsi tentang industri bahwa pendidikan yang berorientasi industri bukan semata mencetak tenaga-tenaga terampil melainkan bagaimana industrialisasi dapat mengembangkan kearifan yang menopang daya cipta, keterpercayaan (*trust*), etos kerja, kreativitas inovatif, disiplin, keteraturan, dan perencanaan, *kedua* miskonsepsi tentang teknologi. Teknologi selalu dimaknai sebagai alat. Lebih dari itu pemaknaan teknologi harus berbicara tentang kerangka mental dan kosmologi sosial yang berperan menyemai benih-benih pengetahuan untuk tumbuh dan membuahkan pengetahuan baru, dan *ketiga* miskonsepsi tentang pengembangan SDM. Pembangunan sumber daya manusia diselaraskan dengan pembangunan kapabilitas dan keberfungsian manusia seperti tuntutan *United Nations Development Programme*.

Ketiga miskonsepsi itu semestinya mempunyai relasi nilai dan norma dengan konsep budaya Indonesia sehingga wacana Kebangkitan Baru Indonesia

terwujud tanpa melepaskan marwah pendidikan dan kebudayaan kita yang merupakan lingkup pendidikan sejarah. Filosofis pendidikan Indonesia hakekatnya adalah aktualisasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD). KHD mengusulkan beberapa konsep pendidikan Tri Pusat Pendidikan yang bertujuan:

1. Pendidikan keluarga
2. Pendidikan di alam perguruan
3. Pendidikan dalam pemuda dan masyarakat (Suparlan 2016, 59)

Usulan sekaligus pesan KHD tercermin bagaimana pendidikan ditanamkan sejak dini. Menurutnya:

Sistem pendidikan yang didasarkan dari jati diri bangsa akan membuat bangsa yang mandiri, terlepas dari kungkungan bangsa Barat yang selama ini telah menciptakan pendidikan berorientasi pada kepentingan kolonial. Sistem pendidikan tidak semata-mata tembok-tembok kokoh yang membentengi konvensionalitas berpikir manusia (Wiryopranoto dkk., 2017).

Kita telah dibutakan oleh konsep-konsep pendidikan kekinian. Persepsi tentang pendidikan bertitik tolak pada pikiran bahwa pendidikan hanya berada di lingkungan gedung, megah, atau lengkap dengan segala infrastruktur dan fasilitas. Kita melupakan “pesan cinta” KHD untuk bangsa Indonesia, sementara pesannya serasa diadopsi dalam diri seorang guru dari Amerika yang menuliskan buku *The End of Education* tahun 1995. Ialah Neil Postman, mampu menangkap pesan ini hingga ia sendiri menuangkannya ke dalam buku. Pendidikan kehilangan arah untuk mengkonstruksikan pikiran tentang penemuan sains dan teknologi. Dari perspektif Postman (2019, hlm. vii), pendidikan dewasa ini menggambarkan pola-pola pengajaran peserta didik yang “tidak tuntas”. Sedangkan di luar sana teknologi sudah menjadi guru bagi peserta didik yang tidak membutuhkan jawaban dari guru di sekolah. Tembok-tembok sekolah berubah wujud menjadi benteng baja kokoh yang menutup akses kemerdekaan. Kritik Postman bertitik tolak dari dua hal, yakni; *Pertama*, pendidikan tidak sekadar mengajarkan apa yang ada melainkan mempertanyakan mengapa semua itu ada. *Kedua*, bila jawaban atas pengetahuan sudah tersedia, apa yang mesti dipertanyakan lagi? Tentunya bukan pragmatisme kebutuhan (untuk apa bertanya jika semua sudah tersedia), melainkan kritisme historis agar tindakan proposional tidak merugikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar pengaruhnya terhadap kekuatan satu bangsa. Globalisasi membuat dunia tanpa sekat. Butuh kekuatan kesejatan identitas kebangsaan untuk tetap menjadi bagian warga dunia di satu sisi dan meneguhkan nilai kebangsaan di sisi lain. Pada poin ini, kedudukan mata ajar sejarah sangat dibutuhkan dengan harapan besar agar cepatnya gerak zaman di bidang sains dan teknologi tetap menjadikan bangsa Indonesia tidak tergilas oleh percepatan tersebut. Taufik Abdullah sempat melontarkan kata-kata sarkastis di hadapan Pengurus Pusat MSI menanggapi suara eksekutif muda terhadap globalisasi. Baginya:

Bagi seseorang yang mempelajari sejarah, pertanyaan sarkastik –“sejarah untuk diekspor” – terasa menggugah juga. Ironi dan sarkasme sang eksekutif muda semakin mengental terasa, jika diingat bahwa ia dan kawan-kawannya sedang tumbuh menjadi kelompok sosial yang semakin memainkan peran penting dalam perjalanan bangsa [...]. Dengan segala konsekuensi logis dari perkembangan yang telah dirintis sekarang, kelompok sosial ini akan menjadi semakin besar dengan peranan yang juga semakin penting dan berpengaruh. Maka, bisakah dibayangkan sebuah bangsa yang dibina oleh kelompok sosial yang terlepas dari “ingatan kolektif bangsa”? (Syukur, 2013, hlm.2)

Syukur (2013, hlm.3) melihat sindiran Taufik Abdullah didasarkan oleh pandangan umum bila sains dan teknologi menjadi parameter besar dan majunya suatu bangsa. Parameter ini tanpa kita sadari memungkinkan kita terjebak dalam situasi tidak berarah. Sementara pendapat berbeda juga penting untuk dimaknai bersama. Kita tidak menampik pendapat-pendapat tersebut akan tetapi besar dan majunya satu bangsa tidak lantas menceraabut akar budaya hanya dikarenakan hasrat mengejar ketertinggalan sains dan teknologi bangsa Indonesia dari bangsa lain. Pergerakan pendidikan kita jangan sampai menghapus kesejatan Indonesia karena Revolusi 4.0 tidak semata-mata didefinisikan sebagai kebutuhan utama pendidikan melainkan suatu kebutuhan abad. Jangan sampai kita terjebak pada konsep kemajuan sains dan teknologi yang menggeserkan nilai-nilai kehidupan Bangsa Timur. Pelajaran sejarah, walau bagaimanapun memiliki kegunaan yang penting untuk membawa bangsa ini semakin besar sebagai bangsa yang mampu menjaga ke-Indonesia-annya.

Sjamsuddin dalam tulisannya, *Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, menjelaskan *moralizing history* atau sejarah moral dimana pendidikan sejarah berguna secara instrinsik. Menurutnya, kegunaan instruksi sejarah itu mencakup empat hal; 1) Interpretasi dan eksplanasi; 2) Bimbingan. Perasaan (*sense*) mengenai apa yang dapat kita kerjakan pada masa yang akan datang dibentuk oleh suatu kesadaran mengenai apa yang telah terjadi atau tidak pernah terjadi pada masa lalu; 3) Inspirasi. Sejarah merupakan suatu sumber inspirasi dan pemahaman mengenai apa yang telah dipikirkan, dirasakan, diharapkan atau diperbuat seseorang individu atau kelompok masyarakat pada masa lalu; dan 4) Kesadaran kelompok. Mencari identitas pribadi, menuntut akar-akar dari masa lalu yang mula-mula kita cari lewat silsilah (*genealogi*) dan sejarah keluarga. Dan semua itu bisa dilalui dengan memahirkan siswa menerapkan keterampilan *historical thinking* karena kemahiran dalam berpikir sejarah siswa mempunyai kaitan dengan motivasi instrinsik (Kaviza, Fauziah, dan Bukhari 2019)

Upaya pemerintah menelusuri sebab dan musabab kejenuhan peserta didik di ruang-ruang kelas sejarah mendorong proses berkelanjutan yang tiada henti melalui kajian-kajian akademis, analisis, serta paling utama proses perubahan kurikulum mata ajar sejarah. Terakhir sekali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan porsi lebih kredit mata ajar sejarah SMA (Kurikulum 2013) agar kecintaan peserta didik terhadap sejarah bangsanya mampu memberikan ruang berkesan, sehingga dari mata ajar sejarah peserta didik belajar mengetahui sejarah bangsa Indonesia lewat historiografi oleh sejarawan dan selanjutnya diteruskan lewat narasi, interpretasi, dan eksplanasi dalam proses belajar-mengajar di ruang-ruang kelas. Selain guru dan dosen, peran LPTK merupakan hulu membangkitkan hasrat belajar sejarah berlandaskan *historical thinking*. Husna dan Syukur (2020, hlm. 28) punya perspektif serupa bahwa:

...terdapat peran dosen dalam memantik kemampuan berpikir tersebut sehingga mahasiswa pendidikan sejarah yang merupakan calon guru sejarah memiliki kemampuan berpikir historis yang mumpuni. Pembiasaan penggunaan berpikir historis dalam perkuliahan ini membuat mahasiswa pendidikan sejarah mampu memahami peristiwa sejarah secara menyeluruh seperti para sejarawan dan ketika menjadi guru sejarah, mahasiswa pendidikan sejarah menerapkan kemampuan berpikir ini dan mengajarkannya kepada peserta didik.

Kecenderungan penggunaan metode, media, dan strategi pembelajaran sejarah menuntut kemampuan menghafal peserta didik oleh guru sejarah, tidak terlepas dari kemampuan guru sejarah itu sendiri. Ada kebiasaan yang telah membudaya di sebagian guru sejarah memilih pembelajaran sejarah seperti itu. Guru-guru sejarah sering kali sulit atau tidak bersedia keluar dari pola umumnya. Guru semestinya mengedepankan kaidah pengajaran sejarah, termasuk menguasai aspek psikologi dan profesionalitas. Bila merujuk pada pendapat Abdullah dan Ainon, guru bertanggung jawab mengatur pembelajaran yang kondusif, dengan begitu akan muncul kesan di diri peserta didik dan mempelancar relasi kebatinan diantara keduanya (Lejah dan Talin 2018, hlm. 138)

Di era Revolusi 4.0 ini tuntutan akan kebutuhan peningkatan kualitas guru sejarah, baik kompetensi dan profesionalisme guru, harus ditelaah dengan bijaksana. *Student Centre jadi acuan* (Habsoh, 2016, hlm. 2), sedang Kochhar memberi penegasan bila sejarah cukup memiliki keluasan muatan, dimana dalam prosesnya melibatkan pelbagai keahlian, pemahaman, juga mengeneralisasikan untuk kemudian dikuasai peserta didik (Rismaya, 2018, hlm. 74). Oleh karena itu, konsep *The Five "C's"* dan *The Big Six*, sangat relevan diterapkan di pelajaran sejarah, termasuk penggunaan teknologi digital pendukung penguasaannya. Saya tertarik mengadopsi kedua konsep tersebut, karena komponen kedua konsep cukup memenuhi kebutuhan peserta didik berselancar dengan alam pikirannya membicarakan sejarah masa lalu.

Dari gambaran bagaimana guru dan pembelajaran sejarah serta hangatnya perbincangan tentang wacana kebijakan Mendikbud menyederhanakan kurikulum dan beberapa realitas yang telah digambarkan sebelumnya, mendorong saya melakukan observasi awal dan membuka obrolan dengan rekan-rekan sejawat. Akhirnya saya mencoba berbicara *via* telepon seluler dengan beberapa rekan guru sejarah di beberapa kota seperti, Batang (Jawa Tengah), Medan (Sumut), dan Batam (Kepri). Isu utama obrolan menyangkut *historical thinking* guru sejarah. Bincang-bincang ini mengerecut pada tiga kesimpulan sementara, *pertama*, kompetensi *historical thinking concepts* dan *historical thinking skills* guru sejarah belum merata; *kedua*, sebagian besar guru sejarah terpaku pada pembelajaran konvensional dengan pendekatan ekspositori menggunakan metode ceramah, tanya

jawab, dan lembar latihan, serta bermuara pada penilaian autentik sehingga *high order thinking* peserta didik tidak tampak; dan *ketiga*, kunjungan ke situs-situs bersejarah sudah dilakukan namun pemanfaatannya tidak menginterpretasikan pemahaman guru sejarah tentang *historical thinking concepts* dan *historical thinking skills*.

1.1.2 Ruang Digital dan Konsep *Historical Thinking* (*The Five “C’s”* dan *The Big Six*)

Keterbukaan ruang digital kini memungkinkan guru meningkatkan segala kemampuannya dalam pembelajaran sejarah di kelas. Kemampuan guru sejarah yang saya anggap mendasar dan memenuhi kebutuhan peserta didik sebagaimana kebutuhan zaman adalah kemampuan berpikir sejarah atau *historical thinking*, karena keterampilan ini membawa pelajaran sejarah siap mentransformasikan tujuan dari pendidikan sejarah dan tentunya tidak lari dari akar budaya bangsa. Bagi Tilaar (2006), mengharapkan pembelajaran di ruang kelas tidak sekedar mengingat atau mempersiapkan diri untuk segala bentuk ujian, namun satu aktivitas empiris terhadap masalah aktual dan memecahkan segala permasalahan dengan berani mengambil keputusan. Karena akhir dari *historical thinking skill*, sesuai konsep *The Five “C’s”*, ialah analisis isu-isu historis dan *decision making*. Guru sejarah berperan besar mengembangkan *historical thinking skills* peserta didik yang terdiri dari 5 standar utama, yakni; berpikir kronologis, pemahaman historis, analisis dan interpretasi historis, kemampuan penelitian historis, dan analisis isu historis dan pengambilan keputusan (*decision making*) karena keterampilan mengambil keputusan dalam *historical thinking* merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam konsep *The Five “C’s”*, tepatnya pada komponen terakhir setelah memahami isu-isu kontemporer (Ismayanti, 2015, hlm. 7).

Guru mata ajar sejarah harus jeli menumbuhkembangkan semangat peserta didik dalam menganalisis rekam jejak perjalanan sejarah bangsanya dengan potensi diri membentuk perubahan berarti. Setidaknya, perubahan tersebut sekaitan dengan kebutuhan abad-21 dan pergerakan Revolusi 4.0 dimana beberapa negara Asia lainnya telah bergeliat menghasilkan kemajuan zaman yang sejalan dan terimplementasi dalam kehidupan manusia.

Dalam buku *21st Century Learning Skills-Learning for Life in Our Times*, keterampilan Abad-21 yang terbagi atas beberapa keterampilan, menjadi 3 kategori: (1) *Learning and Innovation Skills*, berpikir kritis dan memecahkan masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreatifitas dan inovasi; (2) *Digital Literacy Skills*, informasi literasi, media literasi, informasi dan komunikasi teknologi literasi; (3) *Career and Life Skills*, fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, keterampilan sosial, produktifitas, dan kepemimpinan. Keterampilan tersebut adalah pendekatan menyegarkan dan sesuai artinya bahwa keterampilan adalah sarana untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan bukan tujuan itu sendiri (Trilling dan Fadel, 2009, hlm. 85). Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini menurut Trilling and Fadel (2009) adalah:

Keterampilan hidup dan karir sangat penting untuk modal bekerja dan belajar di abad ke-21. Meskipun keterampilan tersebut sudah tercipta sebelumnya, namun sangat memberikan arti baru karena memanfaatkan teknologi digital yang saat ini tersedia untuk bekerja dan belajar. Keterampilan ini akan mempermudah kebutuhan di abad 22 (hlm. 86)

Menurut Hasan, tuntutan itu dilakukan dengan mengubah kompetensi terutama dalam tujuan pendidikan sejarah (Juleha, 2020, hlm.2). Tujuan yang dimaksud menurut Hasan yaitu kerjasama, *self-direction*, *learning how to learn*, berfikir kritis serta kreatif. Dari *Historical thinking skills* guru mata ajar sejarah, potensi *historical thinking skills* peserta didik bisa terwujud sehingga bangsa Indonesia mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain tanpa menghilangkan jati diri.

Historical thinking skills guru mata ajar sejarah sudah waktunya diinterpretasikan kembali (reintepretasi) sebagai bentuk afirmasi tentang betapa pentingnya mata ajar sejarah dalam mengikuti gerak zaman yang pengaruhnya tidak bisa dihadang oleh kekuatan apapun kecuali kekuatan diri akan memori kolektif bangsa Indonesia terhadap perjalanan panjang menuju satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia. Globalisasi dan modernisasi di dunia tanpa kita sadari perlahan menggerus rasa cinta generasi muda kepada bangsanya. Situasi seperti ini sangat mengkhawatirkan bila posisi guru mata ajar sejarah tidak bersedia membuka khazanah potensi dirinya agar sejalan dengan cara berpikir peserta didik yang memanfaatkan fasilitas media digital sebagai sumber paling sering diakses.

1.1.3 MGMP Sejarah Kota Batam Wahana Meningkatkan *Historical Thinking Skill*

Setelah saya menguraikan variabel-variabel dari tajuk kajian saya, maka variabel selanjutnya adalah MGMP. Mengapa MGMP Sejarah saya jadikan wahana meningkatkan *Historical Thinking Skill guru sejarah*? Tidak lain karena melalui MGMP, guru sejarah akan terlibat langsung dan merasakan kebermanfaatannya menjadi bagian dari peningkatan kualitas diri dalam menguasai dan mempertajam *historical thinking skills* mereka.

Untuk dapat mengembangkan *historical thinking skills* guru sejarah maka fungsi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sejarah harus dimaksimalkan yang diharapkan berlaku efektif, khususnya MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam. Efektifitas dan efisiensi MGMP Sejarah lebih sering berbentuk pertemuan silaturahmi semata serta tidak menghasilkan langkah-langkah inovatif guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru sejarah. MGMP Sejarah selalu mengesankan wadah berbincang-bincang ringan ketimbang mendiskusikan problematika dalam pembelajaran sejarah, meskipun kondisi ini tidak bisa digeneralisasi. Seharusnya MGMP sebagai wadah bagi pendidik dimanfaatkan (Sugiyono 2015, hlm. 242) untuk, ‘saling bertukar pikiran yang diasumsikan dapat memecahkan problematika dalam pelaksanaan pendidikan baik dari segi implementasi, pengembangan, monitoring dan evaluasi guna menciptakan pendidikan yang berkualitas’.

Hal senada disampaikan (Saripuddin, Yulifar, dan Anggraini, 2021) berdasarkan hasil penelitian yang memanfaatkan media pembelajaran. Mereka meyakini bahwa untuk meningkatkan fungsi MGMP maka penyelenggaraan dan pengembangan MGMP perlu dilakukan dengan maksud meningkatkan profesionalisme guru khususnya guru sejarah.

Oleh sebab itu, sebagai ujung tombak pengikat identitas nasional, motivasi peserta didik memahami sejarah masa lalu serta siap mengikuti kebutuhan zaman yang tetap bermartabat maka sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah, seyogyanya perlu menyiapkan diri menghadapi laju pengetahuan peserta didik di era digitalisasi dan siap menghadirkan kembali *historical thinking skills* melalui

pertemuan-pertemuan MGMP Sejarah. *Reinterpretasi historical thinking skills* guru mata ajar sejarah merupakan upaya alternatif-solutif menjadikan pelajaran sejarah menjadi hidup, kemudian menginspirasi peserta didik melahirkan makna berkesan tentang peristiwa masa lalu yang bukan sekedar menarasikan peperangan, kekerasan, dan penderitaan, melainkan inspirasi peristiwa masa lalu bisa berbentuk semangat mengilhami kejayaan sejarah masa lalu bangsa yang perlu diulang kembali dalam konteks dan waktu berbeda di masa sekarang. Kejayaan masa lalu bangsa Indonesia tidak cukup dikenang semata, kejayaan masa lalu bangsa Indonesia menuliskan juga kisah tokoh-tokoh hebat seperti bapak pendiri bangsa yang menjadi *role model* peserta didik sebagai generasi pelanjut gerak zaman. Untuk mudah bagi peserta didik menemukan keterhubungan, pola, ataupun kecenderungan gerak zaman, ada baiknya guru sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam memperkuat penguasaan konsep *historical thinking* baik konsep *The Five "C's"* maupun *The Big Six*, karena 'penguasaan konsep menurut Lee bisa bersifat analitis atau dipakai sebagai instrumen jika guru sejarah memiliki *historical literacy*' (Supriatna, 2012, hlm. 127).

Dari keseluruhan deksripsi tersebut, saya merasa peran MGMP Sejarah SMA di Kota Batam memiliki relevansi fungsi dan tujuan agar proses *reinterpretrasi historical thinking skill* guru sejarah berfaedah dan berhasil menjalani proses tranformasi kepada peserta didik. Sinergitas antar guru sejarah menghadirkan dialog lewat pertemuan diharapkan dapat berkontribusi menemukan solusi tentang problematika pendidikan sejarah menuju pembelajaran sejarah berkesan, dengan demikian MGMP punya posisi strategis menyumbang sekaligus melatih kompetensi guru mata ajar sejarah tentang konsep-konsep dasar sejarah. Konsep dasar tersebut dapat dimulai dari *historical thinking skills*, dirumuskan sesuai kaedah yang ada. Oleh karena itu, kajian *historical thinking skills* guru sejarah melahirkan pemikiran saya menjadi tema penelitian dengan judul, "Reinterpretrasi *Historical Thinking Skills* Guru Sejarah Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui MGMP Sejarah SMA di Kota Batam".

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang maka pemaparan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Reinterpretasi *Historical Thinking* Guru Sejarah dalam Pembelajaran Sejarah Melalui MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam. Untuk menjawab permasalahan di atas, saya memfokuskan penelitian melalui pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah *historical thinking* guru mata ajar sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam sudah sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas guru?
2. Bagaimana pemahaman guru mata ajar sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam terhadap *historical thinking skills*?
3. Mengapa *Reinterpretasi historical thinking skills* guru Sejarah melalui MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam menjadi upaya penting dalam pembelajaran sejarah?
4. Kendala apa saja yang dialami guru mata ajar sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah di Kota Batam untuk melakukan *Reinterpretasi historical thinking skills*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis *historical thinking* guru mata ajar sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas guru.
2. Mengidentifikasi pemahaman guru mata ajar sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam terhadap *historical thinking skills*.
3. Mendeskripsikan pentingnya *Reinterpretasi historical thinking skills* guru Sejarah melalui MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam dalam pembelajaran sejarah.

4. Mengidentifikasi kendala guru mata ajar sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah di Kota Batam untuk melakukan Reintepretasi *historical thinking skills*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berkontribusi dalam upaya perbaikan atas persoalan-persoalan mata pelajaran sejarah dan memberikan analisis secara riil bahwa MGMP Sejarah mampu menjadi medium penguatan *historical thinking skills* guru yang bertransformasi terhadap *historical thinking skills* peserta didik.

1. Penelitian ini turut menjadi pola pengembangan pembelajaran mata ajar sejarah SMA di Kota Batam dengan mengaktifkan dan memaksimalkan fungsi MGMP Sejarah yang berdampak positif kepada eksplorasi potensi peserta didik.
2. Penelitian ini memberikan gambaran realitas *historical thinking skills* guru sejarah di lingkungan MGMP Sejarah SMA/MA di Kota Batam. Baik kekurangan maupun kelebihan guru sejarah yang tergabung dalam MGMP.
3. Guru Sejarah SMA di Kota Batam diharapkan menjadi cerminan bahwa pemerintah daerah memerlukan pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan kualifikasi kompetensi dan profesionalitas guru sejarah sebagaimana kebutuhan peserta didik.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini terdiri dari lima bab dengan meletakkan deskripsi masing-masing bab sebagaimana judul dari tesis yang peneliti jadikan topik penelitian. Tujuannya guna memberikan gambaran sistematis serta mengidentifikasi bagian-bagian penting bab.

Bab I merupakan gambaran dari latar belakang permasalahan yang diselaraskan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Keselarasan diantara empat detail bagian sangat menunjang saya menjabarkan poin-poin utama di bab ini. Identifikasi permasalahan menjadi batasan agar memiliki panduan.

Bab II berisi kajian pustaka. Bagi setiap penelitian kajian pustaka berfungsi menemukan teori-konsep-maupun dalil penelitian, terutama penemuan atas hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian baik dari hasil penelitian dalam negeri maupun luar negeri. Kajian teori, konsep, dan penelitian yang telah dihasilkan sebelumnya sangat mempedomani saya dalam keputusan menyanggah teori, konsep, dalil ataupun menerima dan menambahkan teori, konsep, maupun dalil di dalam penelitian serta diharapkan membawa proses penelitian kepada unsur kebaruan yang bermanfaat untuk penelitian lainnya.

Bab III menjabarkan metode penelitian. Terkait dengan metode penelitian yang saya pilih yakni metode kualitatif dengan pendekatan etnografi digital, diharapkan akan menambah referensi dunia kajian ilmiah khusus di bidang pendidikan karena etnografi digital memungkinkan penelitian ini berlangsung aman dan lancar mengingat waktu penelitian ini dilakukan selama masa pandemi dimana setiap individu diwajibkan mengikuti regulasi Satuan Tugas Covid-19. Etnografi digital yang saya pakai turut menambah penemuan-penemuan terbaru dalam etnografi tradisional sehingga penelitian ini memperkaya kajian-kajian etnografi di pendidikan sejarah sebagai metodologi penelitian.

Bab IV berisi temuan-temuan dari proses penelitian berisi krisis-krisis penelitian. Dari krisis-krisis penelitian akan membangun perspektif melalui proses refleksi penelitian. Refleksi penelitian berguna bagi saya ketika memproduksi ilmu pengetahuan beretika, dan hal-hal kebaruan yang bisa memberikan gambaran untuk dapat dipergunakan pada penelitian selanjutnya.

Bab V menjadi bab penutup berisi kesimpulan penelitian. Dalam bab terakhir ini, saya memaparkan simpulan, implikasi, dari topik kajian, pemilihan penelitian, serta rekomendasi-rekomendasi argumentatif berdasarkan hasil penelitian. Rekomendasi-rekomendasi dimaksudkan agar bisa diaktualisasikan baik oleh saya sendiri pada penelitian berikutnya maupun khalayak dalam skop kajian serupa dan ekspektasinya memantik dan

menginspirasi topik kajian yang sama dengan gagasan berbeda sehingga memperluas pandangan kajian di bidang pendidikan sejarah.